

Analisis Efisiensi Anggaran Penyertaan Modal Daerah (PMD) Pada BUMD Provinsi DKI Jakarta

Ariana Salsabila Haruni^{1*}, Ratna Meisa Dai²

^{1,2} Universitas Padjadjaran

*E-mail Korespondensi: arianasalsabilah04@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 12-05-2025

Revision: 01-06-2025

Published: 02-08-2025

DOI Article:

10.24905/permana.v17i3.798

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi anggaran Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode *purposive sampling* dan teknik analisis rasio efisiensi yang membandingkan antara realisasi anggaran dan target capaian program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar program yang didanai melalui PMD berhasil mencapai target kinerja, namun realisasi anggarannya belum sepenuhnya efisien. Sebanyak 60% program menunjukkan nilai efisiensi di atas 100%, yang mengindikasikan adanya *overbudgeting* dan ketidaktepatan perencanaan anggaran. Temuan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran PMD, termasuk dalam aspek monitoring dan evaluasi. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi kelemahan sistem penganggaran daerah serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas investasi daerah melalui PMD.

Kata Kunci: efisiensi, anggaran, penyertaan modal daerah, BUMD

ABSTRACT

This study aims to analyze the efficiency level of Regional Capital Participation (PMD) budget in Regional-Owned Enterprises (BUMD) in DKI Jakarta Province during the period of 2020 to 2023. A descriptive quantitative approach was employed, using purposive sampling and efficiency ratio analysis techniques that compare budget realization with program performance targets. The results indicate that although most PMD-funded programs achieved their performance targets, the budget realization was not entirely efficient. Approximately 60% of the programs exhibited efficiency values above 100%, suggesting overbudgeting and inaccurate budget planning. These findings highlight the need for improvements in budget planning and management processes, particularly in terms of monitoring and evalua-

Acknowledgment

tion. This research contributes to identifying weaknesses in local budgeting systems and provides recommendations for enhancing the effectiveness of regional investment through PMD.

Key word: *efficiency, budget, regional capital participation, BUMD*

© 2025 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan, termasuk keuangan. Pengelolaan keuangan ini mencakup pemanfaatan kekayaan daerah, termasuk dalam bentuk investasi seperti Penyertaan Modal Daerah (PMD) ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada dasarnya, pendirian BUMD dilakukan untuk memberikan manfaat bagi perekonomian Daerah, menyediakan layanan publik berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan hidup masyarakat daerah yang bersangkutan dan memperoleh laba dan/atau keuntungan (Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, 2017). Terkait hal ini, maka BUMD memiliki kaitan yang erat dengan penerimaan daerah. Karena semakin besar laba yang diperoleh BUMD, semakin besar pula pendapatan dividen yang akan didapat oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan dividen ini kelak akan diakui sebagai pendapatan asli daerah (PAD) dan dianggarkan dalam APBD. Maka dari itu, pengelolaan atas BUMD sangat dibutuhkan agar pemerintah daerah bisa memaksimalkan pendapatan asli daerahnya.

Selain sebagai sumber pendapatan, BUMD juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan barang atau jasa untuk masyarakat luas, seperti transportasi, asuransi, utilitas, pangan, dan lain-lain. Maka untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah selaku pemilik saham perusahaan memiliki wewenang untuk menyertakan investasi langsung berupa Penyertaan Modal Daerah (PMD) berbentuk uang atau barang. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi yang dilakukan pemerintah daerah dengan cara mengalihkan barang milik daerah dan/atau uang, yang awalnya merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk dihitung sebagai modal daerah di BUMD. Penyertaan Modal Daerah (PMD) sendiri hanya bisa diberikan apabila APBD tahun anggaran berjalan diperkirakan surplus dengan mengacu pada RPJMD dan Rencana

Bisnis BUMD (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, 2012).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal daerah pada BUMD diatur oleh peraturan daerah. Maka dari itu, penyerahan PMD dikoordinir dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dari masing-masing provinsi. Pengelolaan ini umumnya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Namun, di Provinsi DKI Jakarta sendiri terdapat 1 Badan yang bertugas untuk menunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD). Sehingga, BP BUMD berperan langsung dalam proses penyerahan PMD pada setiap BUMD. Uniknya, Provinsi DKI Jakarta merupakan satu-satunya daerah yang memiliki satu perangkat daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini menjadikan BP BUMD DKI Jakarta sebuah keunikan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri.

Meski begitu, realisasi anggaran PMD Provinsi DKI Jakarta menunjukkan fluktuasi selama tahun 2020–2023. Penurunan terbesar terjadi di tahun 2021 dimana realisasi anggaran PMD hanya sebesar 61,12%. Hal ini berbanding terbalik dengan realisasi anggaran PMD Provinsi Jawa Barat yang tidak memiliki badan pengelola BUMD secara khusus. Selama 4 tahun kebelakang, Provinsi Jawa Barat berhasil merealisasikan anggaran PMD-nya secara penuh di tiap tahunnya.

Tabel 1. Perbandingan Realisasi Anggaran PMD Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

Tahun	Provinsi DKI Jakarta			Provinsi Jawa Barat		
	APBD	Realisasi	%	APBD	Realisasi	%
2020	4.416,4M	4.086,7M	92,53	53.018M	53.018M	100
2021	9.664M	5.906,8M	61,12	100.000M	100.000M	100
2022	4.722,7M	3.492,1M	73,94	562.105,5M	562.105,5M	100
2023	5.434,7M	4.836,4M	88,99	231.000M	231.000M	100

Sumber: LKPD Provinsi DKI Jakarta dan LKPD Provinsi Jawa Barat 2020-2023

Jika dilihat dari segi efisiensi, maka hal ini dapat mengindikasikan adanya ketidakefisienan dalam proses penganggaran PMD di Provinsi DKI Jakarta, baik itu dalam hal perencanaan anggaran, pengelolaan anggaran, maupun faktor lain yang dapat mempengaruhi proses realisasi

anggaran. Selain itu, perbedaan struktur organisasi dari kedua provinsi tersebut juga menimbulkan pertanyaan lain terkait kinerja atas pengelolaan PMD yang dilakukan oleh BP BUMD DKI Jakarta. Sebagai provinsi yang memiliki badan pengelola khusus dengan jumlah BUMD yang lebih kecil, seharusnya penganggaran PMD di Provinsi DKI Jakarta bisa lebih efisien dibandingkan Provinsi Jawa Barat yang tidak memiliki badan pengelola khusus.

Secara umum, pengertian efisiensi berkaitan erat dengan produktivitas (Mahmudi, 2019). Kegiatan operasional suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efisien apabila suatu hasil kerja dapat mencapai target yang ditentukan dengan menggunakan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (Mardiasmo, 2018). Secara matematis, efisiensi dapat diukur dengan membandingkan nilai output dengan input atau biasa disebut dengan istilah lain yakni output per unit input (Mahmudi, 2019). Konsep ini juga tidak bersifat absolut, tetapi bersifat relatif dengan bergantung pada nilai input dan tingkat produktivitas dari suatu unit. Semakin kecil rasio efisiensi belanja, maka dapat mengindikasikan bahwa semakin besar efisiensi dari realisasi belanja terhadap total belanja dan memiliki arti bahwa organisasi memiliki kinerja yang baik (Mahmudi, 2019). Dalam hal anggaran, pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran dengan standar biayanya. Standar biaya yang disusun juga harus mempertimbangkan nilai ekonomi standar pelayanan minimum yang harus dipenuhi (Mahmudi, 2019).

Menurut Mahmudi (2019) dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Kinerja Sektor Publik* menyebutkan bahwa terdapat lima kriteria penilaian efisiensi dalam keuangan sektor publik sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Klasifikasi Tingkat Efisiensi Menurut Mahmudi

Kategori	Presentase Efisiensi
Sangat Efisien	<90%
Efisien	90% - 99%
Cukup Efisien	100%
Tidak Efisien	>100%

Sumber: Mahmudi, 2019

Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu bagaimana kinerja BP BUMD dalam memaksimalkan efisiensi anggaran PMD pada BUMD di DKI Jakarta dengan berkaca pada realisasi anggaran PMD sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 serta perkembangan pembangunan atau program yang disalurkan dana PMD sebagai bentuk investasi. Hal tersebut juga

akan dianalisis secara mendalam terkait gambaran kondisi lapangan dari proses penyerahan PMD pada BUMD di provinsi DKI Jakarta serta menganalisis kendala yang dihadapi pemerintah provinsi dalam proses penganggarannya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis data secara kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dengan tujuan menyusun strategi pengembangan hipotesis berdasarkan informasi dari lapangan, sehingga menghasilkan data yang berguna untuk penelitian di masa depan. Pendekatan pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dimana sampel ditentukan dengan mempertimbangkan kebutuhan data dalam memperhitungkan tingkat efisiensi atas anggaran PMD di Provinsi DKI Jakarta serta kebutuhan data lainnya yang dapat mendukung analisis atas perhitungan yang dilakukan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti melakukan perhitungan dan analisis tingkat efisiensi anggaran Penyertaan Modal Daerah (PMD) menggunakan analisis rasio efisiensi.

Rasio efisiensi adalah perbandingan antara realisasi anggaran dan pagu anggaran. Rasio ini menunjukkan tingkat penghematan anggaran oleh pemerintah. Jika hasil perhitungan rasio efisiensi kurang dari 100%, maka pemerintah dinilai efisien dalam mengelola anggaran. Sebaliknya, jika hasil perhitungan rasio efisiensi melebihi 100%, hal itu mengindikasikan adanya pemborosan anggaran (Mahmudi, 2019). Tingkat efisiensi anggaran dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rumus Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Semakin kecil rasio efisiensi belanja, semakin tinggi efisiensi realisasi belanja terhadap total anggaran, yang menunjukkan bahwa organisasi memiliki kinerja yang baik. Menurut Mahmudi (2019) dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik, terdapat lima kriteria yang digunakan untuk menilai efisiensi keuangan dalam sektor publik seperti tabel berikut.

HASIL

Dalam pelaksanaannya, pemberian dana penyertaan modal daerah (PMD) di Provinsi DKI Jakarta berlangsung setiap tahun dengan menyesuaikan program pembangunan daerah setiap tahunnya. Penyerahan dana tersebut dilakukan melalui mekanisme penganggaran yang nantinya akan disahkan melalui Peraturan Daerah (PERDA) atau Peraturan Gubernur (PER-

GUB) Provinsi DKI Jakarta. Di Provinsi DKI Jakarta sendiri, terdapat 14 BUMD yang aktif beroperasi saat ini. Dan berdasarkan data pada lampiran APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2023, terdapat 10 BUMD yang dianggarkan dana PMD-nya. Secara rinci, penganggaran PMD pada BUMD tersebut dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Daftar BUMD penerima PMD Tahun 2020-2023

Nama BUMD	2020	2021	2022	2023
Perumda Air Minum Jaya	✓	✓	✓	✓
Perumda Pembangunan Sarana Jaya	✓	✓	✓	-
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	✓	✓	-	✓
PT MRT Jakarta (Perseroda)	✓	✓	✓	✓
PT Jakarta Tourisindo (Perseroda)	✓	✓	-	✓
Perumda Pasar Jaya	✓	✓	-	-
Perumda Paljaya	✓	-	✓	✓
PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda)	-	✓	-	-
Perumda Dharma Jaya	-	-	-	✓
PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroda)	-	-	-	✓

Sumber: APBD Provinsi DKI Jakarta 2020-2023

Seluruh BUMD tersebut diberikan PMD untuk menunjang program kegiatan daerah yang sebagian besar merupakan program pembangunan daerah, pengembangan bisnis dari BUMD yang bersangkutan, dan penguatan modal pemerintah daerah guna memaksimalkan kinerjanya dalam melayani atau menyediakan kebutuhan hidup masyarakat. Oleh karena itu, efisiensi dari anggaran ini perlu diperhatikan karena *output* yang dikeluarkan berhubungan langsung dengan masyarakat. Melalui pembangunan tersebut, dana PMD diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, penyerapan tenaga kerja, dan pelayanan publik untuk mendukung tujuan pembangunan daerah.

Untuk menghitung tingkat efisiensi dari anggaran tersebut, perhitungan dilakukan dengan mengukur output per input dari masing-masing program. Dalam hal ini, nilai kinerja input dihitung dengan mengukur persentase realisasi anggaran, sedangkan nilai kinerja *output* dihitung dengan menghitung pencapaian target kinerja atas program yang dijalankan. Maka secara matematis, perhitungan efisiensi atas anggaran PMD yang diberikan akan dihitung dengan rumus berikut.

$$\text{Rumus Efisiensi} = \frac{\text{Nilai Kinerja Output}}{\text{Nilai Kinerja Input}} \times 100\%$$

Berikut merupakan perhitungan tingkat efisiensi dana PMD Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 - 2023.

Tabel 4. Perhitungan Tingkat Efisiensi Anggaran PMD Tahun 2020

Program	Satuan	Target Kinerja (Rencana)	Capaian Kinerja (Realisasi)	Nilai Kinerja (4/3)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
TAHUN 2020					
1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih					
INPUT					
Anggaran (PD. AM Jaya)	Juta Rupiah	240,000.00	108,895.90	45.37%	Tidak Efisien
OUTPUT					
Cakupan pelayanan air bersih	%	66.09	64.33	97.34%	
2 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum					
INPUT					
Anggaran (PT. MRT)	Juta Rupiah	1,587,186.0	1,433,474.50	90.32%	Tidak Efisien
OUTPUT					
Jumlah proyek AKDP, angkutan perkotaan dan perdesaan	Proyek	408	408	100.00%	
3 Program Penyediaan dan Pemeliharaan/Perawatan Perumahan Rakyat					
INPUT					
Anggaran (PT. Jakarta Propertindo)	Juta Rupiah	1,382,000.0	1,382,000.0	100.00%	Cukup Efisien
Anggaran (PT. Jakarta Tourisindo)	Juta Rupiah	92,196.0	92,196.0	100.00%	
Anggaran (PD. Pembangunan Sarana Jaya)	Juta Rupiah	950,000.00	950,000.00	100.00%	
OUTPUT					
Persentase capaian penyelesaian rencana aksi Pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional	%	100	100	100.00%	
Persentase capaian renovasi dan perbaikan Grand Cempaka Business Hotel	%	100	100	100.00%	Cukup Efisien
Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	0	0	100.00%	
4 Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Persampahan					
INPUT					Tidak

Program	Satuan	Target Kinerja (Rencana)	Capaian Kinerja (Realisasi)	Nilai Kinerja (4/3)	Keterangan
Anggaran (PD. Pasar jaya)	Juta Rupiah	162,000.0	117,114.3	72.29%	Efisien
Anggaran (PD. PAL Jaya)	Juta Rupiah	3,000.00	3,000.00	100.00%	
OUTPUT					
Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	unit	26	26	100.00%	

Sumber: Data diolah oleh penulis

Pada tahun 2020, 3 dari 4 program yang dijalankan menunjukkan ketidakefisienan yang signifikan. Terutama pada program pengembangan dan pengelolaan air bersih dimana realisasi anggaran hanya sebesar 45,37%, namun cakupan pelayanan air bersih telah mencapai 97,34% dengan tingkat efisiensi mencapai lebih dari 200%. Meski nilai efisiensinya tidak serendah program pengembangan dan pengelolaan air bersih, 2 program lainnya juga menunjukan nilai efisiensi hingga lebih dari 100%. Hal ini mencerminkan ketidakseimbangan antara anggaran yang direncanakan dan kebutuhan riil di lapangan. Kondisi ini sering disebut dengan istilah *overbudgeting* dimana pengalokasian dana terlalu besar tanpa dasar kebutuhan yang konkret. Setiap anggaran seharusnya bisa dibuat berdasarkan nilai kebutuhan secara riil di lapangan, sehingga tidak akan ada sejumlah anggaran yang tak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin karena adanya kesalahan dalam proses perencanaan. Selain itu, dengan sisa anggaran yang dimiliki juga seharusnya dana tersebut bisa dialihkan untuk program lain yang lebih membutuhkan melalui mekanisme realokasi anggaran.

Sementara itu, 1 program lainnya yakni Program Penyediaan dan Pemeliharaan/Perawat Perumahan Rakyat menunjukkan kinerja yang cukup baik dimana seluruh anggaran dapat 100% terealisasi dan semua target kinerja tercapai 100% hingga dapat dikategorikan sebagai cukup efisien. Meskipun tak menunjukan adanya indikasi pemborosan, realisasi anggaran yang penuh menunjukan tidak adanya penghematan yang signifikan, begitu pula dengan capaian kinerja 100% yang tidak menunjukan adanya pencapaian di atas target (*over performance*).

Secara teknis, realisasi anggaran 100% memang menunjukan kondisi ideal dimana pemerintah daerah dapat menggunakan seluruh sumber dayanya untuk mencapai target kinerja yang ditentukan. Tapi dalam manajemen sektor publik, efisiensi tak hanya dinilai dari sisi

ekonomi saja, tetapi juga dari sisi alokatif dimana capaian kinerja juga diperhitungkan. Sehingga, penggunaan anggaran yang penuh belum bisa dikatakan efisien tanpa adanya pengelolaan secara maksimal untuk mencapai hasil output yang sebaik-baiknya bahkan hingga melampaui target yang ditentukan.

Tabel 5. Perhitungan Tingkat Efisiensi Anggaran PMD Tahun 2021

Program	Satuan	Target Kinerja (Rencana)	Capaian Kinerja (Realisasi)	Nilai Kinerja (4/3)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
TAHUN 2021					
1 Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua warga Jakarta					
INPUT					
Anggaran (PT. Propertindo)	Jakarta Rupiah	Juta 3,831,000.0	3,831,000.0	100.00%	
OUTPUT					
Persentase penyelesaian aksi Pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional	capaian rencana %	100	100	100.00%	Cukup Efisien
2 Meningkatnya akses sanitasi layak					
INPUT					
Anggaran (PD. PAM Jaya)	Jakarta Rupiah	Juta 99,252.7	94,522.7	95.23%	
OUTPUT					
Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih	capaian rencana %	100	100	100.00%	Tidak Efisien
3 Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta					
INPUT					
Anggaran (PT. MRT)	Jakarta Rupiah	Juta 5,369,838.0	1,617,420.2	30.12%	
OUTPUT					
Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi	capaian rencana %	100	100	100.00%	Tidak Efisien
4 Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya.					
INPUT					
Anggaran (PD. Sarana	Jakarta Juta	175,000.0	175,000.0	100,00%	Cukup Efisien

Program	Satuan	Target Kinerja (Rencana)	Capaian Kinerja (Realisasi)	Nilai Kinerja (4/3)	Keterangan
Jaya)	Rupiah				
OUTPUT					
Persentase penyelesaian rencana aksi	%	100	100	100.00%	
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat					
5 Mewujudkan Peran dan Kontribusi BUMD yang optimal kepada Peningkatan nilai Investasi di Provinsi DKI Jakarta.					
INPUT					
Anggaran (PT. Jakarta Tourisindo)	Juta Rupiah	187,503.5	138,874.3	74.06%	
Anggaran (PT. Food Station Tjipinang)	Juta Rupiah	50,000.0	50,000.0	100.00%	Efisien
OUTPUT					
Persentase BUMD yang masuk dalam kategori sehat	%	77	67	87.01%	

Sumber: Data diolah oleh penulis

Memasuki tahun 2021, terdapat keberagaman dari tingkat efisiensi program-program yang dijalani, mulai dari tidak efisien bahkan hingga efisien. Dalam hal ini, terdapat 2 program yang tergolong tidak efisien, yakni program peningkatan akses sanitasi layak dan program pembangunan sarana dan prasarana transportasi bagi warga Jakarta. Menyorot pada 2 program tersebut, diperlukan suatu perhatian khusus dan evaluasi mendalam atas program pembangunan sarana dan prasarana transportasi bagi warga Jakarta dimana anggaran hanya bisa terealisasi sebesar 30,12% dengan capaian kinerja penuh hingga 100%. Sama seperti di tahun sebelumnya, program dengan kondisi seperti ini perlu dievaluasi secara mendalam baik pada tahap perencanaan maupun tahap monitoring dan evaluasi. Selain mengindikasikan adanya pemborosan dalam proses perencanaan, kondisi ini juga bisa mencerminkan bahwa tidak ada dorongan dari lembaga pembina untuk mendorong BUMD pengelola dalam memanfaatkan sisa anggaran yang tersedia untuk menghasilkan *output* yang lebih baik selama proses monitoring dan evaluasi di tahun berjalan. Sebagai pilihan lain, sisa anggaran yang tersedia juga seharusnya bisa dilimpahkan untuk program lain agar dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi seluruh kegiatan dalam roda pemerintahan.

Pada tingkatan berikutnya, terdapat 2 program yang tergolong cukup efisien, yakni program penjaminan akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan

dan program pembangunan kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan. Program ini tentunya menunjukkan hasil kinerja yang cukup baik, tapi belum cukup untuk dikategorikan sebagai efisien tanpa adanya penghematan dengan mengelola penggunaan input seminimal mungkin atau usaha untuk meningkatkan hasil kinerja hingga melebihi target capaian.

Pada program terakhir, yakni program untuk mewujudkan Peran dan Kontribusi BUMD yang optimal kepada Peningkatan nilai Investasi di Provinsi DKI Jakarta menjadi satu-satunya program yang bisa mencapai hasil efisiensi sebesar 99,98% yang tergolong sebagai efisien. Program ini menunjukkan adanya keseimbangan antara besaran input dan output yang berhasil dicapai dengan realisasi anggaran sebesar 87.03% dan capaian kinerja sebesar 87.01%. Kondisi ini menunjukkan keselarasan dan capaian yang realistis antara perencanaan anggaran yang dibuat, besaran anggaran yang digunakan, serta capaian kinerja yang didapat. Kondisi ini merupakan kondisi yang cukup ideal untuk dikatakan efisien dalam lingkup manajemen sektor publik.

Tabel 6. Perhitungan Tingkat Efisiensi Anggaran PMD Tahun 2022

Program	Satuan	Target Kinerja (Rencana)	Capaian Kinerja (Realisasi)	Nilai Kinerja (4/3)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
TAHUN 2022					
1 Meningkatnya akses sanitasi layak					
INPUT					
Anggaran (PD. AM Jaya)	Juta Rupiah	372,570.00	372,570.00	100.00%	
OUTPUT					
Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Bersih Air	%	100	100	100.00%	Cukup Efisien
Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Limbah dan Air Limbah Komunal		100	100	100.00%	
Nomor					
2 Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan					

Program	Satuan	Target Kinerja (Rencana)	Capaian Kinerja (Realisasi)	Nilai Kinerja (4/3)	Keterangan
keberdayaan yang berkualitas bagi semua warga Jakarta					
INPUT					
Anggaran (PAL Jaya)	(PD. Juta Rupiah)	200,000.00	200,000.00	100.00%	
OUTPUT					
Persentase penyelesaian rencana aksi					Cukup Efisien
Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif	%	100	100	100.00%	
3 Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya					
INPUT					
Anggaran Sarana Jaya)	(PD. Juta Rupiah)	250,000.00	250,000.00	100.00%	
Anggaran MRT)	(PT. Juta Rupiah)	3,900,138.30	2,669,496.40	68.45%	
OUTPUT					
Persentase penyelesaian rencana aksi					
Pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional	%	100	100	100.00%	
Nomor Persentase penyelesaian rencana aksi					Tidak Efisien
Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)	%	100	100	100.00%	
Persentase penyelesaian rencana aksi					
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Nomor	%	100	100	100.00%	

Sumber: Data diolah oleh penulis

Pada tahun 2022, efisiensi belum menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tiap

programnya. Program Meningkatkan akses sanitasi layak serta Program Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua warga Jakarta masuk kategori cukup efisien dengan efisiensi sebesar 100%. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, program dengan kategori cukup efisien tidak mengindikasikan adanya potensi pemborosan dan tidak juga menunjukkan adanya penghematan maupun performa kinerja yang melebihi target.

Lain halnya dengan 2 program sebelumnya, Program Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya yang dikelola oleh PD. Pembangunan Sarana Jaya dan PT. MRT Jakarta justru menunjukkan efisiensi yang sangat rendah. Rencana anggaran yang dibuat hanya terealisasi sebesar 84,22% sedangkan target kinerja yang ditentukan berhasil mencapai angka 100%. Kondisi ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam tahap perencanaan, bisa dalam bentuk Perencanaan anggaran tidak akurat atau *over budgeting* dimana alokasi dana terlalu besar tanpa dasar kebutuhan yang riil atau sesuai dengan kondisi lapangan.

Tabel 7. Perhitungan Tingkat Efisiensi Anggaran PMD Tahun 2023

Program	Satuan	Target Kinerja (Rencana)	Capaian Kinerja (Realisasi)	Nilai Kinerja (4/3)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
TAHUN 2023					
1 Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan					
INPUT					
Anggaran (PD. Dharma Jaya)	Juta Rupiah	250,000.0	250,000.0	100.00%	
OUTPUT					
Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi	%	100	100	100.00%	Cukup Efisien
Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penurunan Stunting Sub KSD	%	100	100	100.00%	

Program	Satuan	Target Kinerja (Rencana)	Capaian Kinerja (Realisasi)	Nilai Kinerja (4/3)	Keterangan
Percepatan penurunan stunting					
2 Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Yang Berkualitas					
INPUT					
Anggaran (PD. AM Jaya)	Juta Rupiah	249,000.0	135,000.0	54.22%	
OUTPUT					
Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Pengelolaan Air Bersih	%	100	100	100.00%	Tidak Efisien
3 Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit					
INPUT					
Anggaran (PT. MRT)	Juta Rupiah	2,279,678.6	2,021,526.3	88.68%	
Anggaran (PT. Jakarta Propertindo)	Juta Rupiah	2,416,000.0	2,416,000.0	100.00%	
OUTPUT					
Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapanya	%	100	100	100.00%	Tidak Efisien
Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Percepatan Penanganan Kemacetan Sub KSD Pembangunan dan Pengoperasian Sarana Angkutan Umum Massal Berbasis Rel	%	100	100	100.00%	
4 Mewujudkan BUMD Unggul melalui kapasitas manajemen berdaya saing serta aspek keuangan yang kuat dan bersinergi					
INPUT					
Anggaran (PT. Jakarta Tourisindo)	Juta Rupiah	15,000.0	13,870.9	92.47%	Tidak Efisien

Program	Satuan	Target Kinerja (Rencana)	Capaian Kinerja (Realisasi)	Nilai Kinerja (4/3)	Keterangan
Anggaran (PT. JIEP)	Juta Rupiah	225,000.0	-	0.00%	
OUTPUT					
Persentase BUMD yang masuk dalam kategori sehat	%	100	92.77	92.77%	

Sumber: Data diolah oleh penulis

Pada tahun 2023, tren ketidakefisienan juga muncul pada sebagian besar program. Dalam hal ini, hanya program peningkatan Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan yang berhasil merealisasikan seluruh anggarannya dalam mencapai target program yang ditetapkan. Sehingga, hanya program ini yang tergolong cukup efisien tanpa adanya indikasi pemborosan meski tak menunjukkan adanya tindakan penghematan yang maksimal oleh pemerintah daerah selaku pengelola.

Tiga program lainnya, yakni Program pembangunan Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan, Program Pengembangan Kota Berorientasi Transit, dan Program penguatan aspek keuangan BUMD menunjukkan tingkat efisiensi yang rendah dengan persentase efisiensi sebesar 106% hingga 200%. Sama seperti program-program sebelumnya, diperlukan evaluasi mendalam atas perencanaan anggaran yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Maka secara umum, capaian kinerja output program-program BUMD DKI Jakarta relatif tinggi dan stabil pada kisaran 100%. Namun, terdapat tantangan serius dalam hal efisiensi anggaran dimana selama 4 tahun tersebut, dana PMD seringkali tidak terealisasi secara penuh tetani berhasil mencapai target program yang dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan program tercapai, perencanaan anggaran masih perlu dievaluasi dan disesuaikan agar lebih realistis, efektif, dan akuntabel. Evaluasi mendalam diperlukan untuk mencegah pemborosan dan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Selain itu, evaluasi juga diperlukan dalam proses pelaksanaan anggaran dan program, tepatnya pada tahap monitoring dan evaluasi dimana pemerintah daerah seharusnya bisa mengelola anggaran PMD yang tersisa baik untuk mendorong capaian kinerja yang maksimal ataupun realokasi anggaran.

SIMPULAN

Berkaitan dengan efisiensi, pelaksanaan anggaran Penyertaan Modal Daerah (PMD) di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020 hingga 2023 masih perlu diperhatikan dan dievaluasi karena belum tergolong efisien. Sebesar 60% dari keseluruhan program memiliki tingkat efisiensi diatas 100%, yang secara matematis menunjukkan bahwa output yang dicapai lebih besar dibanding input anggaran yang digunakan. Secara ekonomi, hal ini dapat diartikan sebagai efisiensi tinggi dalam penggunaan sumber daya. Namun, dalam konteks manajemen sektor publik, angka efisiensi yang tinggi juga dapat mengindikasikan adanya perencanaan anggaran yang kurang akurat atau ketidaksempurnaan dalam proses alokasi sumber daya. Oleh karena itu, meskipun secara matematis efisien, hal ini tetap memerlukan perhatian lebih lanjut terkait mekanisme perencanaan dan realisasi anggaran yang diterapkan.

Permasalahan ini tepatnya mengindikasikan bahwa perencanaan anggaran belum dilakukan secara matang dan berbasis data yang akurat, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat efisiensi. Selain itu, pengawasan, evaluasi, serta penyesuaian program terhadap kebutuhan riil di lapangan juga masih menjadi tantangan yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, Dalam menangani permasalahan tersebut, pemerintah daerah dapat meningkatkan akurasi perencanaan anggaran, memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi, peningkatan koordinasi lintas sektor, pengembangan indikator kinerja yang lebih relevan, dan penguatan kapasitas manajerial BUMD agar penyaluran PMD ke BUMD benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan daerah..

DAFTAR PUSTAKA

- BP BUMD DKI Jakarta. (2020). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi BP BUMD Tahun 2020.
- BP BUMD DKI Jakarta. (2022). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BP BUMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.
- BP BUMD DKI Jakarta. (2023). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BP BUMD DKI Jakarta Tahun 2023.
- Jakarta, P. P. D. (2021). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020.
- Lampiran 1 Peraturan Gubernur No 35 Tahun 2023: Ringkasan Penjabaran Perubahan Apbd Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023, Pub. L. No. 35, 1 (2023).

- Lampiran 1 Peraturan Gubernur No 66 Tahun 2022: Ringkasan Perubahan Penjabaran Apbd Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022, Pub. L. No. 66, 1 (2022).
- Lampiran 1 Peraturan Gubernur No 96 Tahun 2021: Ringkasan Perubahan Penjabaran Apbd Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021, Pub. L. No. 96, 1 (2021).
- Lampiran I A Peraturan Daerah No 3 Tahun 2020 Provinsi DKI Jakarta: Ringkasan Penjabaran Perubahan Apbd Tahun Anggaran 2020, Pub. L. No. 3, 1 (2020).
<https://bprd.jakarta.go.id/>
- Mahmudi. (2019). Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2021). Laporan Kinerja Pemerintah Daerah BP BUMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2022). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2024). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023. 165–166.
- PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA. (2023). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 (pp. 188–189).
<https://ppid.jakarta.go.id/show/asset/LKPD2022>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (2012).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/111795/permendagri-no-52-tahun-2012>
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (2017).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/64765/pp-no-54-tahun-2017>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (2014).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, 1964 JDIH BPK Database Peraturan 1 (2004).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40446/uu-no-1-tahun-2004#:~:text=Undang-Undang Nomor 1 tahun,Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor>